

Pelembagaan Demokrasi di Pedesaan Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah 2001 – 2002

Program ini digagas karena kecenderungan fakta bahwa demokratisasi dan desentralisasi yang dihasilkan oleh arus reformasi politik negeri ini, ternyata hanya dirasakan oleh segelintir elit politik nasional maupun lokal. Komunitas rakyat kecil, khususnya petani dan masyarakat adat tak mendapat manfaat apa-apa. Demokratisasi dan desentralisasi belum mampu menjawab dan membebaskan mereka dari persoalan marginalisasi.

Kondisi tersebut diperparah oleh praktek "politik massa mengambang" yang dilembagakan rezim Orde Baru pada komunitas pedesaan. Akibatnya, komunitas pedesaan tidak memiliki kesiapan memanfaatkan prosedur demokrasi yang dibangun oleh rezim reformasi. Mereka belum mampu mengembangkan serta memperkuat otoritasnya. Mereka juga belum memiliki bangunan struktural dan kultural dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan politiknya.

Karenanya, program Pelembagaan Demokrasi di Pedesaan Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah ini, secara umum ditujukan untuk mendorong terbangunnya wacana dan inisiatif masyarakat sipil di pedesaan untuk mengembangkan dan memperkuat kelembagaan demokrasi dan proses berdemokrasi di Kabupaten Banggai. Wilayah kerja program ini meliputi 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui-Banggai, masing-masing: Toili, Batui, Kintom dan Luwuk.

Pemilihan Kabupaten Banggai, khususnya wilayah KAPET Batui sebagai wilayah kerja program, didasarkan pada 2 (dua) argumentasi. *Pertama*, masih kuatnya sistem *feodalisme* warisan kerajaan Banggai; *kedua*, KAPET Batui syarat konflik agraria dan PSDA antara pemilik modal dan komunitas rakyat (petani dan masyarakat adat).

Program ini secara khusus bertujuan memobilisasi pelibatan (partisipasi aktif) komunitas petani dan masyarakat adat di pedesaan dalam proses perumusan kebijakan politik dan pembangunan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengartikulasikan kepentingan politiknya. dengan menggunakan media: studi dan analisis kebijakan, dialog kebijakan, kampanye media, aksi massa serta organisasi rakyat. Pendampingan teknis, Pelatihan, serta diskusi-diskusi kritis dilakukan untuk mengawal proses tersebut.